

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 22 Agustus 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Satgas TPPU Periksa 56 Pihak

JAKARTA - Ketua Tim Pelaksana Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Sugeng Purnomo menyatakan pihaknya telah memeriksa 56 pihak terkait kasus impor emas batangan senilai Rp 189 triliun.

"Direktorat Jenderal Bea-Cukai itu sudah mengunjungi tiga tempat dengan memeriksa 56 pihak. Kemudian, ada data tentang ketidakseimbangan antara barang yang masuk dan keluar. Barang yang masuk ternyata lebih sedikit dari barang yang keluar. Artinya, kalau barang masuk sedikit, keluar banyak, ada barang lain yang ikut. Ini sedang diteliti," kata Sugeng di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (21/8).

Sugeng menjelaskan, penelitian terus dilakukan terhadap indikasi-indikasi barang ilegal dari kasus TPPU 189 triliun ini.

Penelusuran kasus merupakan bagian dari upaya mengungkap kasus prioritas dalam pengusutan dugaan pencucian uang Rp 349 triliun.

"Tim mengembangkan bukan hanya dari kepabeanaan, tapi juga perpajakan. Diindikasikan pada wilayah tertentu ada indikasi barang ilegal. Ini yang sedang dilakukan penelitian," jelas Sugeng.

Selain itu, dia mengatakan, akan bertindak lebih agresif dalam tahap penyelesaian salah satu kasus tersebut.

Sugeng menegaskan Satgas terus bekerja sesuai arahan Menko Polhukam Mahfud MD.

Lebih Agresif

"Di samping itu, ada satu kasus yang penyelesaiannya didorong lebih agresif. Ini bisa mengindikasikan bahwa Satgas terus bekerja di antaranya surat perintah keputusan Pak Menko selaku komite di pertengahan Mei. Bea Cukai sudah bergerak," tandasnya.

Kasus Rp 189 triliun merupakan bagian dari 300 laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun.

Kasus transaksi janggal inilah yang menjadi latar belakang pembentukan Satgas TPPU.

Menko Polhukam Mahfud Md juga

menegaskan, proses kasus pencucian uang Rp 349 triliun terus berjalan. Mahfud menepis jika kasus itu disebut hilang.

"Selalu ada yang bertanya Rp 349 triliun itu kok dilempar lalu hilang? Nggak hilang. Pertama, kasus itu sudah terbukti ada, DPR sudah mencocokkan betul itu ada kasus atau peristiwa dugaan pencucian uang Rp 349 triliun," kata Mahfud.

Mahfud menandakan, ada 300 surat di dalam kasus TPPU Rp 349 triliun. Mahfud mengatakan, kasus terus dituntaskan.

"300 surat kalau diselesaikan satu-satu kan harus. Pertama, perlu waktu. Yang kedua, tidak bisa dipublikasikan semua dan Saudara bisa baca publikasinya sendiri, sudah ditindaklanjuti di berbagai tempat, di KPK, di Polri, di Kejaksaan," ungkap Mahfud.

Dia pun mencontohkan beberapa kasus yang tengah diungkap dan masuk dalam Rp 349 triliun tersebut. Salah satunya, kasus mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo.

"Impor emas dari Soetta ada di situ juga. Dari surat itu yang pemecatan dan penersangkaan di Ujung Pandang, Makassar, dari situ juga. Jadi jalan. Tidak ada yang berhenti, tetapi jangan berarti Rp 349 triliun itu satu paket lalu selesai. Itu dipisah dalam 300 kasus," ungkap Mahfud. (dtk-41)